

BAB II

PEROMPAK SOMALIA

2.1 Awal Konflik dan Kejatuhan Somalia

Pada abad ke-19 dan pertengahan abad ke-20, negara-negara kolonialis membagi Somalia menjadi lima bagian. Inggris mengambil dua bagian sementara Italia, Ethiopia dan Prancis masing-masing mengambil satu bagian. Berada dibawah kolonialisme, Somalia berjuang untuk mendapat kemerdekaannya. Somalia Utara dan Selatan masing-masing merdeka pada 26 Juni 1960 dan 01 Juli 1960 diikuti dengan terbentuknya Negara Somalia secara kesatuan. Dari tahun 1960 hingga tahun 1969, Somalia adalah negara demokratis serta terpilihnya presiden pertama Somalia yaitu Aden Abdulle Osman Daar. Beliau resmi menjabat status presiden sejak tahun 1 Juli 1960 hingga 10 Juni 1967. Melalui kudeta yang terjadi pada tahun 1969, Presiden Osman Daar digantikan oleh Siyad Barre. Pada masa pemerintahannya, Barre menjalin hubungan dekat dengan Uni Soviet, yang memberikan bantuan kepada Somalia sepanjang tahun 1970-an (Venugopalan 2017).

Konflik yang terjadi di Somalia dipicu oleh dukungan Soviet terhadap Ethiopia ketika Siad Barre berusaha untuk mengambil kembali wilayah Somalia Ogaden dari Ethiopia. Dengan adanya kebijakan Soviet tersebut, hal itu memicu kegeraman Presiden Barre yang mengakibatkan Somalia dan Uni Soviet memutuskan hubungannya. Sepanjang awal pemerintahannya Barre didukung oleh Amerika Serikat. Pada tahun 1980 Barre menggantikan penasihat militer Sovietnya dengan penasihat Amerika dan mengubah Somalia menjadi klien Barat. Akibatnya, Amerika Serikat menjadi dekat dengan Somalia. AS memberikan bantuan luar negeri Somalia untuk teknologi militer sebesar US \$163,5 juta antara tahun 1980 dan 1988, dan empat kali lipat untuk pembangunan ekonomi.

Persenjataan Amerika membantu mempertahankan Somalia dari serangan yang didukung Soviet dari Ethiopia pada 1982.

Pada akhir 1980-an, setelah perang Ogaden, kebijakan Barre di utara menghasilkan ketidakpuasan di antara klan Isaaq. Pada saat peristiwa tersebut terdapat lima klan besar di Somalia antara lain Isaaq, Darood, Digil dan Mirif le, Dir, dan Hawiye, dan berbagai klan yang lebih kecil. Isaaq adalah klan utara terbesar, dan merasa terisolasi dari sumber daya politik dan Somalia saat itu. Beberapa gerakan, seperti memberikan pemukiman bagi pengungsi Ogaden di daerah utara dipandang sebagai upaya pihak selatan untuk menumbangkan kepentingan pihak utara (Venugopalan 2017).

Dengan munculnya kebijakan tersebut menimbulkan tindakan pemberontakan terhadap Barre, yang dipimpin oleh klan Isaaq utara. Sebagai tanggapan, Barre memerintahkan pemboman kota-kota utara, desa-desa dan bahkan perkemahan pedesaan. Secara bertahap, pemberontakan menyebar ke wilayah selatan, dan mengakibatkan Barre terpaksa mengungsi di tahun 1992 (Venugopalan, 2017).

Akibat pemberontakan tersebut, Siyad Barre melarikan diri dari Mogadishu pada Januari 1991. Pasukan yang dikomandoi oleh Jenderal Mohamed Farah Aidid mengejar Siyad Barre, sementara Ali Mahdi Mohamed, salah satu pengusaha Mogadishu yang terkenal, menyatakan dirinya sebagai presiden baru dan membentuk pemerintahan. Di utara, klan Isaaq membentuk Somaliland yang independen. Klaim kekuasaan Ali Mahdi tidak diakui oleh kelompok di luar kendalinya sendiri. Sebagai hasil dari perebutan kekuasaan antara dua pemimpin klan yang bertikai, Mohammed Farah Aidid dan Ali Mahdi Mohamed, mengakibatkan warga sipil Somalia terbunuh dan terluka (Venugopalan, 2017).

Pada tahun 1992, diperkirakan 350.000 orang Somalia tewas karena penyakit, kelaparan, atau sebagai korban langsung perang saudara. Setelah pemberontakan terjadi, Dewan Keamanan PBB (DK PBB) menyetujui misi militer yang disebut 'Operasi Restorasi Harapan'. PBB mempercayakan AS

dengan tugas melindungi pengiriman makanan dari panglima perang. Namun, AS terlibat dalam keterlibatan dengan kelompok-kelompok lokal (Lennox 2008).

Pada tahun 1994, AS secara resmi mengakhiri misinya di Somalia, yang menelan biaya US \$ 1,7 miliar dan meninggalkan 43 orang Amerika tentara tewas dan 153 terluka. Operasi penyelamatan dilakukan oleh PBB di Somalia dengan membentuk *United Nations Operation in Somalia* (UNOSOM) yang bertujuan dalam memberikan stabilitas di negara Somalia. Namun UNOSOM mengalami kegagalan dalam mencapai targetnya, sehingga masuk dalam konflik dengan panglima perang Jenderal Mohammed Farah Aidid yang mengakibatkan PBB meninggalkan Somalia dalam kondisi keruntuhan dan perang permanen. Pemerintahan Somalia kemudian diambil alih oleh Hussain Farah Aidid setelah terjadi pembunuhan Mohammed Farah Aidid tetapi tidak menghasilkan pemerintahan yang stabil (Venugopalan 2017).

Setelah upaya tragis yang gagal dari PBB untuk memulihkan ketertiban di daerah yang berakhir Maret 1995, Pemerintah Federal Transnasional (TFG) Somalia dibentuk di pengasingan akhir tahun 2004 dengan dukungan PBB. Pada Juni 2006, kumpulan kelompok-kelompok Islamis yang mirip dengan Taliban di Afghanistan datang bersama di bawah panji-panji Koalisi Pengadilan-pengadilan Islam (CIC) dan mengambil kendali atas dua pertiga Somalia selatan dari TFG (Lennox 2008).

2.1.1 Kekacauan di Somalia setelah Siad Barre

Berangkat dari alasan-alasan awal terjadinya konflik yang disebabkan oleh pemberontakan di Somalia, maka ada baiknya perlu dipahami bagaimana proses politik setelah pemerintahan Siad Barre.

Selama 16 tahun, Somalia mengalami 14 upaya gagal dalam membentuk pemerintahan. Salah satu masalah mendasar adalah bahwa TNG (Transitional National Government) didominasi oleh klan berbasis Mogadishu, terutama subklan Hawiye / Haber Gedir / Ayr. Mereka menghadapi pertentangan dengan Dewan Rekonsiliasi dan Rehabilitasi Somalia (Somali Reconciliation and

Rehabilitation Control), yang didukung oleh Ethiopia. Pemimpin SRRC adalah Abdullahi Yusuf, presiden negara otonom Puntland di timur laut Somalia.

Pada paruh kedua tahun 90-an, peluang bisnis dan komersial terbuka di Somalia. Para pengusaha harus membayar keamanan kepada milisi, namun tidak menerima keamanan substansial sebagai gantinya. Hal ini membuat pengusaha menjadi frustrasi, dan dengan demikian diam-diam membayar beberapa anggota milisi dan memastikan bahwa orang-orang bersenjata berada di bawah perintah pengadilan Syariah setempat. Milisi Syariah menjadi sumber keamanan yang cukup terkenal, dan milisi ini lebih dapat diandalkan dari pada kelompok-kelompok perang (Powell 2006).

Pada tahun 2000 pemerintah TNG yang dibentuk kemudian memastikan bahwa milisi Syariah menurun. Hal ini disebabkan karena kelompok bisnis mengalihkan dukungan mereka kepada pemerintah baru. Setelah TNG gagal, para pengusaha membentuk pasukan keamanan swasta untuk melindungi aset mereka. Kelompok-kelompok pribadi ini menjadi milisi paling kuat di Mogadishu hingga tahun 2006.

Akhirnya, TNG terpaksa menerima konferensi perdamaian yang disponsori oleh The Intergovernmental Authority on Development (IGAD). Direktur utama konferensi adalah Kenya dan Ethiopia. Mereka memilih untuk membentuk aliansi taktis dengan pemimpin kelompok oposisi. Hal ini mengakibatkan munculnya pemerintahan baru yang dipimpin oleh panglima perang pada tahun 2004. Ethiopia, melalui pengaruhnya, mampu mendikte pilihan presiden dan perdana menteri untuk keuntungan mereka. Di sisi lain, koalisi yang bermarkas di Mogadishu didukung oleh Arab yang berisi kaum Islamis anti Ethiopia. Koalisi ini lebih menyukai pemerintahan persatuan yang kuat daripada negara federal dan didominasi oleh klan Hawiye (Powell 2006).

Melihat konflik Somalia di masa lalu dan sekarang, faktor yang mempertahankan kekerasan adalah persaingan untuk sumber daya dan kekuasaan. Akibatnya, kontrol atas kota utama yaitu Mogadishu, Kismayo atau Baidoa,

pelabuhan, bandara utama, pos pemeriksaan penting, daerah yang kaya sumber daya, uang kertas, bantuan asing, mobil yang mengangkut senjata berat menjadi sangat diperebutkan. Penindasan negara adalah penyebab utama dari kedua perang saudara. Masyarakat Somalia mengalami 21 tahun betuk negara yang represif sejak tahun 1969 sampai tahun 1991.

Penyebab lain perang saudara yang terjadi di Somalia adalah warisan kolonial. Kekuatan-kekuatan Eropa sebelum somalia terbentuk yang terdiri dari Inggris, Italia dan Prancis membagi lima bagian Somalia. Inggris mengambil dua bagian, Italia satu dan Prancis satu. Pemisahan Somalia secara permanen merusak rakyat Somalia. Sebagian besar sumber daya pemerintah Somalia yang lemah dan miskin digunakan untuk menyatukan kembali rakyat Somalia. Sementara perang saudara setelah pemerintah runtuh merugikan ekonomi dan menurunkan standar hidup masyarakat (Powell 2006).

2.1.2 Perekonomian Somalia Pasca Konflik

Bencana kemanusiaan yang terjadi di Somalia adalah salah satu dari bencana kemanusiaan terburuk di dunia (www.odihpn.org). Setelah PBB menarik diri pada tahun 1995, pemerintahan Somalia masih mengalami permasalahan berupa konflik klan dan tidak ada kemajuan di negara ini (Powell 2006). Somalia mempertahankan ekonomi informal yang sebagian besar didasarkan pada ternak, perusahaan pengiriman uang, dan telekomunikasi. Pemerintah Somalia tidak memiliki kemampuan untuk mengumpulkan pendapatan domestik dan utang luar negeri dan sebagian besar menunggak yang diperkirakan sekitar 77% dari PDB (www.cia.gov).

Populasi Somalia tertinggal di belakang sebagian besar negara-negara Afrika berpenghasilan rendah. Hanya 58 persen dan 10 persen warga Somalia memiliki akses ke sumber air. Peningkatan akses ke air dan sanitasi adalah kunci untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Air dan sanitasi sangat penting untuk kesehatan individu, juga untuk kegiatan produktif mereka, seperti pertanian. Layanan air dan sanitasi yang tidak memadai meningkatkan paparan anak-anak

terhadap penyakit yang ditularkan melalui air. Selain itu, aksesibilitas yang rendah mempengaruhi waktu yang dibutuhkan anak-anak untuk memenuhi kebutuhan dasar air dan sanitasi (Unicef Report 2017).

Pertanian adalah sektor yang paling penting dengan peliharaan ternak menyumbang sekitar 40% dari PDB dan lebih dari 50% dari pendapatan ekspor (www.cia.gov). Dalam enam bulan pertama tahun 2008 adapun jumlah orang yang membutuhkan mata pencaharian darurat dan bantuan kemanusiaan meningkat sebesar 40%, dari 1,8 juta menjadi 2,6 juta, atau 35% dari populasi. Ketika situasi memburuk, hal tersebut dapat meningkat menjadi 3,5 juta pada akhir tahun yang mana lebih dari setengah populasi Somalia. Satu dari enam anak di bawah usia lima tahun mengalami kekurangan gizi akut dan jumlah ini akan terus meningkat. Tingkat kekurangan gizi akut di antara penduduk pedesaan di sebagian besar Somalia selatan dan tengah berada di atas 15%, yang merupakan ambang darurat yang diakui secara internasional. (www.odihpn.org).

Permasalahan konflik antara klan juga menjadi prioritas penting selain perekonomian Somalia. Terdapat 20.000 pasukan nasional Somalia, dan 23.000 pasukan Misi Uni Afrika dikerahkan di Somalia untuk meredam konflik, dengan korbannya dilaporkan meningkat lebih dari 4.000 orang. Sementara sebagian besar di pusat kota termasuk Mogadishu saat ini berada di bawah kendali Pemerintah Federal. Namun sebagian besar wilayah pedesaan tetap tidak terkendali. Tindakan kekerasan tetap terjadi yang mana dibuktikan dengan pembunuhan sporadis para pembuat kebijakan dan serangan terhadap kompleks pemerintahan (Timothy Wilson, n.d).

Sangat penting bagi Somalia untuk menyelesaikan permasalahan konflik dan membangun perekonomian. Sebagaimana dijelaskan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2013,

UNDP (2012) *“pembangunan tanpa perdamaian tidak berkelanjutan, dan perdamaian tanpa pembangunan tidak akan tahan lama”*

Selama 82 persen populasi Somalia terus hidup dalam kemiskinan multidimensi dan 75 persen kaum muda adalah pengangguran. Faktanya, ada bukti kuat bahwa pemulihan ekonomi adalah alat pembangunan perdamaian yang kuat (Timothy Wilson, n.d).

Beberapa Investor datang ke Somalia untuk mencari uang dalam proses pembangunan kembali sumber daya alam yang melimpah di bidang-bidang seperti pertanian dan peternakan, perikanan, dan minyak dan gas. Diharapkan perkembangan ini akan meletakkan dasar bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih luas. Pilar kedua dari Strategi Enam Pilar Presiden untuk menstabilkan negara adalah pemulihan ekonomi. Sejalan dengan ini, Somalia bertujuan untuk membangun ekonomi yang transparan, formal, berdaya saing global yang mengumpulkan pendapatan pajak (www.irinnews.org).

2.1.3 Munculnya Perompak Somalia

Perompak Somalia dapat dijabarkan menjadi 2 jenis. Pertama, mereka yang dahulunya nelayan yang dipaksa untuk melindungi perairan mereka dari penangkapan ikan ilegal dan pembuangan limbah setelah pemecahan ketertiban di Somalia. Beberapa kelompok perompak mendukung penjelasan ini bahkan menyebut beberapa kelompoknya sebagai 'penjaga pantai' dan menyebut tindakan perompakan sebagai semacam 'pajak' pada kapal penangkap ikan ilegal (www.publications.parliament.uk).

Awalnya nelayan Yaman menangkap ikan secara ilegal di lepas pantai Somalia. Ada berbagai klaim yang menyatakan bahwa nelayan Yaman akan membongkar dan mencuri jaring nelayan Somalia untuk keuntungan masing-masing individu. Disisi lain terdapat 17 Laporan PBB lainnya menyatakan bahwa estimasi makanan laut senilai \$300 juta dicuri dari garis pantai Somalia setiap tahun. Akibatnya, nelayan Somalia mulai menggunakan perahu kecil dan senjata untuk mendatangi nelayan Yaman kemudian memaksa untuk melemparkan ikan ke laut. Disamping itu, nelayan Somalia juga akan menghadapi kapal-kapal potensial lain yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal, dan menyandera para awak kapal sampai mereka membayar denda.

Meskipun serangan ini awalnya dimulai dari keputusan untuk menyelamatkan industri perikanan lokal, perompakan Somalia akhirnya tumbuh menjadi masalah internasional karena ikan di perairan mereka tidak hanya ditangkap secara berlebihan, tetapi juga tercemar oleh limbah berbahaya yang dibuang secara ilegal. Pada tahun 2005, Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan adanya radioaktif uranium dan endapan berbahaya lainnya di air, yang menyebabkan ruam penyakit pernapasan dan kulit. Penyakit menyebar di desa-desa di sepanjang pantai Somalia.

Sementara itu terdapat pendekatan analitis yang mengkombinasikan faktor-faktor produksi untuk mendefinisikan perompakan Somalia. Analisis ini membedakan tiga kategori besar yang membuat operasi perompakan terjadi:

tenaga kerja, sumber daya keuangan, dan modal politik. Tenaga kerja adalah faktor penting. Hal tersebut merujuk kepada anggota kru yang mengarungi kapal menuju calon korban, menyerang dan menaiki kapal, serta mengarahkan kembali kapal yang ditangkap ke pantai Somalia untuk negosiasi tebusan. Terdapat juga milisi perompak penjaga kapal yang dibajak selama negosiasi. Waktu yang dihabiskan para komandan dan penghasut perompak untuk mengatur misi dan mengoordinasikan negosiator tebusan dan penjaga juga dianggap berhubungan dengan tenaga kerja pembajakan. Instrumen navigasi dan komunikasi serta sumber daya keuangan berkontribusi besar terhadap pembajakan (publications.parliament.uk).

Kedua, perompak-perompak Somalia awalnya tidak pernah menjadi nelayan. Para Perompak lebih tertarik dengan keuntungan ilegal yang menguntungkan dari perompakan kapal yang telah membangun skala besar kegiatan kriminal yang secara aktif merusak pembangunan di Somalia.

Hingga saat ini diperkirakan ada antara 1.500 dan 3.000 bajak laut yang beroperasi di lepas pantai Somalia. Saferworld, sebuah organisasi non-pemerintah yang bekerja dengan organisasi-organisasi masyarakat di Somalia, melakukan diskusi kelompok terarah di Somalia untuk mencari tahu lebih banyak tentang perompak dan pandangan masyarakat Somalia tentang pembajakan (publications.parliament.uk).

Perompak-perompak tidak memiliki pendidikan dan keterampilan. Usia para anggota perompak saat ini berkisar antara 15 hingga 30 dan hampir seluruhnya laki-laki. Banyak dari mereka yang berasal dari masyarakat pedesaan yang merasa semakin sulit mencari nafkah dari merawat ternak. Bagi para pemuda ini, perompakan menawarkan kemungkinan menjadi kaya dengan cepat dan

menikmati manfaat terkait dari gaya hidup yang lebih kaya, perkawinan dan peningkatan penggunaan khat¹ (publications.parliament.uk).

2.2 Letak Geografis Somalia

Menurut Martin Murphy, Geografi adalah kondisi pertama yang diperlukan untuk munculnya pembajakan. Pembajakan bersifat berberkelanjutan di tempat-tempat yang menawarkan keuntungan dengan tingkat risiko yang rendah. Tentu saja perairan di lepas pantai Somalia menarik bagi para perompak (Brian Hesse 2011, p. 82).

Somalia memiliki sekitar 637.540 hingga 637.657 km² di mana hanya 10.320 km² yang tertutup air. Di daratan, Somalia memiliki perbatasan sepanjang 58 kilometer dengan negara Djibouti di utara; Ethiopia berbagi perbatasan sepanjang 1.626 km dengan Somalia di utara dan barat, dan di selatan dan barat, Kenya berbagi perbatasan dengan Somalia sekitar 682 km (Lee Hadden 2007).

Negara ini dapat dibagi dalam lima zona fisio-geografis yang berbeda yang dibedakan berdasarkan topografi:

1. dataran pantai utara;
2. pegunungan Golis di utara;
3. dataran pantai tengah;
4. dataran tinggi batu kapur-batupasir luas yang mencakup semua bagian tengah dan selatan Somalia;
5. dataran banjir sungai Juba dan Shabelle di selatan, yang menyediakan
6. potensi pertanian tertinggi (Aquastat Survey, 2005).

Menuju kearah laut, negara ini terletak di pantai Teluk Aden dan Samudra Hindia, dan memiliki garis pantai sekitar 3.025 km. Somalia menempati lokasi strategis di sepanjang Tanduk Afrika mendekati Bab el Mandeb; dan rute laut

¹ Khat adalah Daun semak Arab, yang dikunyah (atau diminum sebagai infus) digunakan sebagai stimulan. (Sumber: <https://en.oxforddictionaries.com/definition/khat>, diakses pada 14 Februari 2019)

melalui Laut Merah dan Terusan Suez. Garis pantai Somalia yang panjang memiliki kepentingan strategis dan taktis terutama dalam memungkinkan perdagangan dengan Timur Tengah dan seluruh Afrika Timur. Kedaulatan diklaim atas perairan teritorial hingga 200 mil laut (Hadden 2007).

Teluk Aden dinamai untuk pelabuhan Aden di Yaman selatan, adalah jalur laut yang memiliki arti strategis. terletak di laut Arab antara Yaman di pantai selatan semenanjung Arab dan somalia di Tanduk Afrika, Teluk Aden adalah bagian dari rute pengiriman Kanal Suez yang penting antara laut mediterania, Laut Merah, Laut Arab dan Samudra Hindia. Diperkirakan bahwa Teluk Aden digunakan oleh sekitar 22.0000 kapal setiap tahun, membawa sekitar 8% dari perdagangan dunia, termasuk lebih dari 12% dari total volume minyak yang diangkut melalui laut. Oleh karena itu, ia membentuk rute transportasi minyak antara Eropa dan Timur (Geiss 2011).

Perairan Somalia di tanduk Afrika hingga ke Teluk Aden merupakan jalur strategis dalam perairan Internasional. Terdapat beberapa area yang dilacak memiliki aktivitas pembajakan tingkat tinggi. Daerah-daerah ini adalah Teluk Aden, dekat Somalia dan pintu masuk selatan ke Laut Merah, Teluk Guinea, dekat Nigeria dan delta Sungai Niger, Selat Malaka antara Indonesia dan Malaysia, dan anak benua India, khususnya antara India dan Sri Lanka (Sullivan 2010).

Karena merupakan salah satu rute perdagangan paling penting di dunia, ribuan kapal melewati Teluk menuju ke Terusan Suez atau sebaliknya setiap tahunnya. Namun Terdapat rute alternatif menuju Teluk Aden yaitu melalui *Cape of Good* (Tanjung Harpan). Rute ini secara geografis lebih panjang dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Jika kapal-kapal dagang berlayara melalui rute ini, secara signifikan akan meningkatkan biaya pengiriman. Dilaporkan bahwa terdapat penurunan lalu lintas pengiriman dan hilangnya pendapatan karena aktivitas ekonomi yang menurun maupun ancaman pembajakan di Teluk Aden.

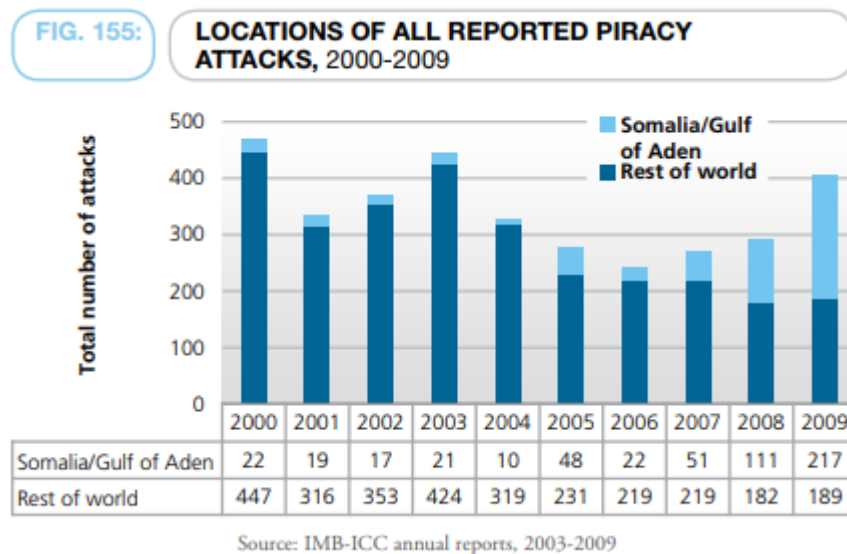
2.3 Kegiatan Perompakan di Somalia sepanjang tahun 2008-2015

Pada tahun 2005 perompak Somalia mulai membajak kapal-kapal komersial yang transit di dekat Tanduk Afrika. Kurangnya peluang ekonomi di pantai membuat ribuan warga Somalia melaut dan terlibat dalam kejahatan internasional tertua di dunia (One Earth future foundation 2012).

Grafik dibawah ini merupakan jumlah total serangan yang terjadi di dunia dan menunjukkan secara spesifik jumlah serangan di Somalia mulai tahun 2000 sampai 2009. Pada tahun 2008 hingga 2009, pembajakan kembali meningkat.

Grafik 2.1

Lokasi Serangan Perompakan



Sumber : Maritime Piracy (www.unodc.org).

Menurut grafik diatas, pada tahun 2000 hingga 2007 jumlah kasus perompakan yang terjadi di perairan Somalia kurang dari 100. Angka ini menunjukkan bahwa perompakan tersebut tidak menyumbang lebih dari 50 persen kasus diseluruh dunia. Sementara terdapat lonjakan kasus pada tahun 2008 sebanyak 111 serangan dan 217 serangan pada 2009.

Pada akhir tahun 2008, Uni Eropa mendapatkan mandat oleh PBB untuk mengirimkan bantuan ke Somalia. Pengiriman bantuan kemanusiaan dari *World Food Programme* ke Somalia harus membayar premi asuransi yang lebih tinggi dan membutuhkan pengawalan kapal dari Uni Eropa. Beberapa perompak Somalia setuju untuk tidak menargetkan kapal yang membawa bantuan kemanusiaan dan kapal komersial lainnya, namun terdapat 10 serangan terhadap pengiriman bantuan kemanusiaan. Pada bulan April 2009, perompak Somalia membajak MV Maersk Alabama dan menyerang MV Liberty Sun, kapal kargo berbendera AS maupun yang dikontrak oleh *World Food Programme* untuk mengirimkan bantuan makanan di lepas pantai tenggara Somalia. Pada bulan November 2009, MV Maersk Alabama kembali diserang meskipun penyerangan tersebut tidak berhasil (www.unodc.org).

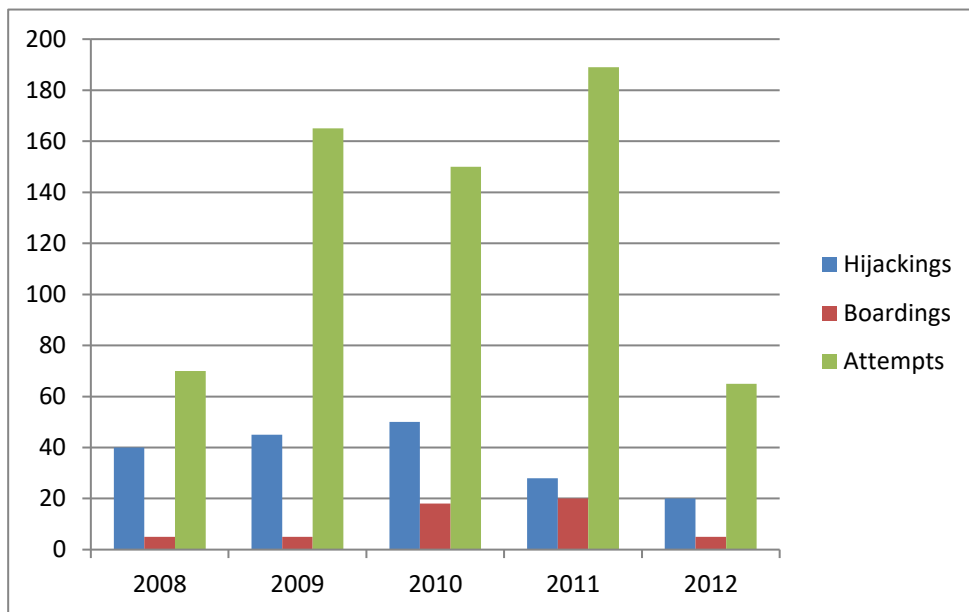
Menurut data statistik yang disediakan oleh Biro Maritim Internasional (IMB), Pada tahun 2010 terdapat 219 serangan oleh perompak Somalia dan menyumbang 49 persen dari total serangan perompakan di seluruh dunia, dimana Perompak Somalia membajak 49 kapal dengan membawa 1.016 pelaut yang disandera. Namun, perompak tidak pernah berniat untuk menyakiti sandera, karena tujuan akhirnya ialah mencari kompensasi finansial. One Earth Future Foundation (OEF) memperkirakan bahwa total tebusan yang dibayarkan kepada perompak Somalia mencapai \$238 juta. Menurut One Earth Future Foundation biaya tebusan dan pembayaran terkait ialah :

1. Durasi rata-rata situasi penyanderaan: 316 hari
2. Rata-rata tebusan yang dibayarkan: \$3,968,750.00
3. Total uang tebusan yang dibayarkan: \$31.750.000,00

Berikut ini adalah grafik jumlah serangan yang dibagi dalam 3 kategori yaitu usaha penyerangan oleh perompak, perompak yang menaiki kapal serta perampokan kapal.

Grafik 2.2

**Data Perompakan Somalia
Hijackings, Boardings, Attempts 2008-2012**



Sumber : The Economic cost of Somali Piracy, One Earth future Foundation, 2012.

Dari dari grafik di atas, Pada tahun 2008 hingga 2010 terdapat peningkatan pembajakan kapal. Pada tahun 2011 terdapat lonjakan 189 upaya serangan. Pada tahun 2012 secara keseluruhan jumlah pembajakan kapal turun menjadi 20 kasus sehingga mengalami pengurangan sebesar 28,5% dari 28 kasus pada tahun 2011. Pada tahun 2012 terdapat pula penurunan dengan hanya 62 upaya serangan. Pada tahun 2012, tingkat keberhasilan para perompak adalah sebesar 24%, naik secara signifikan dari jumlah 13% pada tahun 2011 dan turun sebanyak 27% dari tahun 2010. Pada tahun 2010 dan 2011, biaya tebusan hanya sekitar 2% dari total biaya pembajakan. Pada tahun 2010, 44 tebusan dibayarkan sejumlah \$238 juta, dengan rata-rata sekitar \$5,4 juta per tebusan. Pada tahun 2011, jumlah tebusan yang

dibayarkan dikurangi menjadi 31 dan berjumlah \$159,62 juta. Pembayaran rata-rata tebusan turun menjadi \$4,97 juta. Sementara pada tahun 2012, jumlah dan nilai rata-rata tebusan mengalami penurunan yaitu kurang dari 1% dari total biaya.

Pada tahun 2013, Perompak Somalia hanya menyerang 23 kapal. Tidak ada kapal besar yang transit di wilayah tersebut yang berhasil diserang. Meskipun mengalami penurunan, menurut laporan Oceans Beyond Piracy, bahwa lalu lintas regional masih berisiko (One earth future foundation 2013). Sementara dalam kategori penyanderaan, 171 pelaut ditahan oleh perompak Somalia pada tahun 2013. Namun tidak ada cedera atau kematian pelaut yang pasti terkait perompakan di lepas pantai Somalia pada tahun 2013.

Selama 2014 hanya ada dua serangan dikonfirmasi pada kapal yang transit di daerah berisiko tinggi (HRA) di Samudra Hindia. MV Nave Atropos diserang pada 17 Januari di selatan Salalah dan MV Andrea pada bulan Februari (www.maritime-executive.com). Selama pada tahun 2015 tidak ditemukan kasus perompakan.

Tabel dibawah ini merupakan daftar tabel kapal-kapal Uni Eropa yang dibajak dan atau mengalami perusakan.

Tabel 2.1

Jumlah Kapal Negara anggota Uni Eropa yang dibajak tahun 2008 sampai 2013

No	Nama Kapal	Tahun Pembajakan	Jenis Kapal	Negara Asal	Jumlah Kerugian
1.	MY Le Ponant	2008	Luxury Yacht	Prancis	Tidak disebutkan
2.	FV Playa de Bakio	2008	Fishing Vessel	Spanyol	EUR770,0000
3.	MV Lehmann Timber	2008	Cargo Ship	Jerman	EUR1 Million

4	Carre d'As	2008	Yacht	Prancis	EUR 1Million
5.	MV Torm Freya	2008	Oil/Chemical Tanker	Denmark	Tidak disebutkan
6.	MV Samanyolu	2009	General Cargo	Belanda	Tidak disebutkan
7.	MV Longchamp	2009	Chemical Tanker	Jerman	Tidak disebutkan
8.	German Tanker Spessart	2009	Replenishment Tanker	Jerman	Tidak disebutkan
9.	MV Hansa Stavanger	2009	Container Ship	Jerman	Tidak disebutkan
10.	Tanit	2009	Yacht	Prancis	Tidak disebutkan
11.	MV Bucaneer	2009	Commercial Tugboat	Italia	Tidak disebutkan
12.	MV Panamax Anna	2009	Cargo Vessel		Tidak disebutkan
13.	MV Puma	2009	Cargo Ship		Tidak disebutkan
14.	Pompei	2009	Rock Dumper	Italia	EUR2.8 Million
15.	Somme	2009	Durance Class Tanker	Prancis	Tidak disebutkan
16.	Lynn Rival	2009	Yacht	Inggris	US 750,000
17.	MV St. James Park	2009	Chemical Tanker	Inggris	Tidak disebutkan
18.	MV Taipan	2010	Container Ship	Jerman	Tidak disebutkan
19.	MV Leopard	2010	Cargo Ship	Denmark	Tidak disebutkan
20.	MV Savina Caylyn	2010	Oil Tanker	Italia	EUR11.5 Million
21.	MV Rosalia D'amato	2011	Bulk Carrier	Italia	Tidak disebutkan
22.	MV Irene SL	2011	Oil Tanker	Yunani	Tidak disebutkan
23.	MV Flinstone	2012	Fall Pipe Vessel	Belanda	Tidak

					disebutkan
24.	Patino	2012	Replenishment Oiler	Italia	Tidak disebutkan
25.	MV Smyrni	2012	Oil Tanker	Yunani	US9.5 Million
26.	Bourbon Liberty 249	2012	Anchor Handling Vessel	Luksemburg	Tidak disebutkan
27.	Royal Navy	2013	Fishing Vessel	Spanyol	Tidak disebutkan

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Menurut tabel diatas, terdapat sebanyak 27 kapal Uni Eropa yang mengalami penyerangan dan pembajakan mulai dari tahun 2008 hingga 2013. Jumlah serangan terbanyak terdapat pada tahun 2009 sebanyak 12 kapal dan mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Serangan dan pembajakan kapal anggota UE tidak ditemukan pada tahun 2014 dan 2015.

Gambar dibawah ini merupakan perompak Somalia yang ditangkap oleh patroli Angkatan Laut Uni Eropa Somalia (EUNAVFOR).

Gambar 2.1

Penangkapan Perompak Somalia



Sumber: Africa Renewal, Somali Piracy: in search of remedies for a global malady
(www.un.org)

EUNAVFOR adalah salah satu misi bentukan Uni Eropa dari beberapa inisiatif untuk memerangi pembajakan terhadap pelayaran internasional di lepas pantai Somalia.

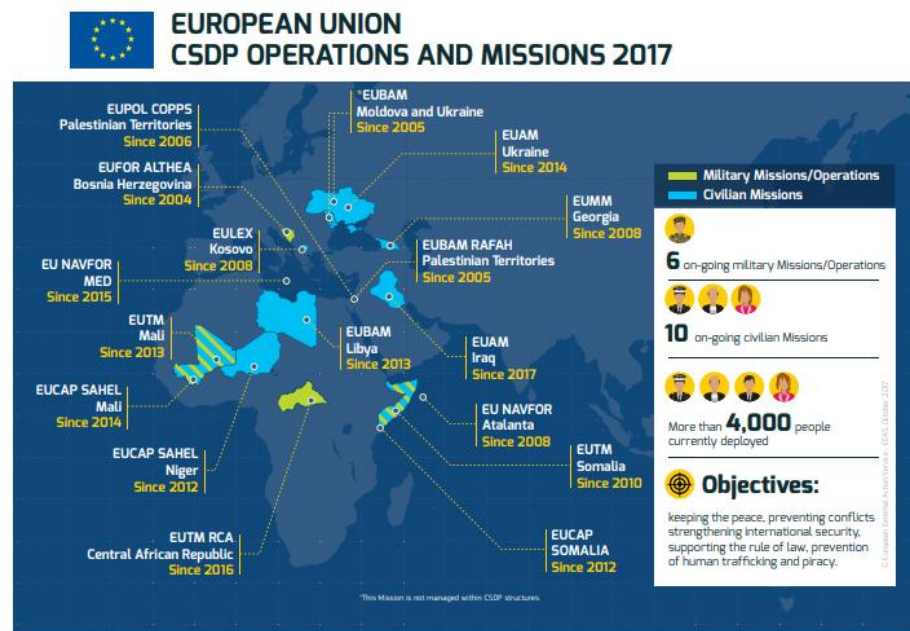
2.4 Operasi-operasi Uni Eropa di Somalia

Uni Eropa terlibat dalam penanganan perompakan di Somalia. Keterlibatannya ditunjukkan melalui operasi-operasi yang dibentuk melalui seperangkat kebijakan *European External Action Service of European Union*. *European External Action Service* atau EEAS adalah layanan diplomatik Uni Eropa yang membantu *the High Representative for Foreign Affairs and Security Policy* menjalankan Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Umum Uni Eropa. Kebijakan Umum Keamanan dan Pertahanan UE atau yang disebut *Common Security Defense Policy* memberikan Uni Eropa kapasitas operasional untuk menggelar misi sipil dan operasi militer, perdamaian; operasi pelucutan bersama; saran dan tugas bantuan militer; tugas stabilisasi pasca-konflik.

Dari gambar dibawah ini dapat dilihat bahwa Uni Eropa memiliki 3 operasi yang dilakukan di Somalia. Operasi tersebut antara lain EU NAVFOR Atalanta, EUTM Somalia dan EUCAP Somalia.

Gambar 2.2

Peta Persebaran Operasi-Operasi Uni Eropa



Sumber: EU Missions and Operations (As part of the EU’s Common Security and Defense Policy https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/csdp_missions_and_operations_factsheet.pdf)

2.4.1. EUTM SOMALIA

The European Union Training Mission in Somalia (EUTM Somalia) adalah misi pembangunan kapasitas maritim sipil yang berkontribusi pada pengembangan stabilitas, kemakmuran, dan keamanan di Somalia. EUTM diluncurkan pada tanggal 7 April 2010 dan mandatnya telah diperpanjang lima kali. Awalnya, program EUTM diadakan di Uganda karena situasi politik di Somalia saat itu tidak kondusif. Mandat Pertama dari operasi ini yaitu pelatihan taktis untuk mendukung Pemerintah Federal Transisi Somalia dalam memperkuat institusi nasionalnya. Mandat ketiga memuat perubahan fokus dengan tambahan

kegiatan konsultasi dan pendampingan strategis untuk melengkapi peran pelatihan. Pada tahun 2014, EUTM Somalia telah berbasis di Mogadishu dengan anggota tim lebih dari 200 dan dipimpin oleh Brigadir Jenderal Matteo Spreafico (www.consilium.europa.eu). Pada 16 Maret 2015, Mandat keempat diperpanjang hingga Desember 2016. Sementara mempertahankan kemampuan pelatihannya dengan fokus pada kepemimpinan dan kursus khusus, Misi ini meningkatkan kegiatan penasehatnya yang bertujuan membangun kemampuan jangka panjang di dalam Kementerian Pertahanan Somalia dan Staf Umum Tentara Nasional Somalia (Somali National Army).

Dalam Mandat keenamnya, EUTM Somalia bertujuan untuk memperkuat institusi pertahanan federal Somalia dan menggunakan pendekatan tiga pilar yaitu pelatihan, pendampingan, dan pemberian nasihat. Sesuai dengan pendekatan komprehensif terhadap keamanan, EUTM Somalia akan memastikan bahwa kegiatannya disesuaikan dengan kepentingan lembaga pertahanan Somalia dan dikoordinasikan dengan mitra internasional lainnya. Selama mandat ini, EUTM Somalia akan fokus pada peningkatan kemahiran, efektivitas, kredibilitas, dan akuntabilitas sektor pertahanan Somalia untuk memungkinkan pihak berwenang Somalia mengambil alih tanggung jawab keamanan secara progresif (www.eutm-somalia.eu).

Misi ini diisi oleh 150 personel Uni Eropa. Dana untuk mendukung misi ini sebanyak lima juta euro untuk tahun kerja 2010 dan 2 juta euro untuk tahun 2011. Pendanaan dibagi antara Negara-negara Anggota Uni Eropa dan dibentuk berdasarkan PDB masing-masing negara yang diatur dalam mekanisme ATHENA. Anggaran mencakup biaya operasional markas misi, dan peningkatan fasilitas pelatihan di kamp Bihanga. Biaya umum untuk memasok pasukan ditanggung oleh negara-negara yang berkontribusi dan ditetapkan sesuai dengan keterlibatan mereka dalam operasi (www.europarl.europa.eu). Dewan Uni Eropa memperpanjang mandat misi pelatihan militer EUTM Somalia hingga 31 Desember 2020 dan menyepakati anggaran sebesar €22,9 juta untuk periode 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020 (www.consilium.europa.eu).

2.4.2. EUNAVFOR ATALANTA

Pada bulan Desember 2008 Uni Eropa meluncurkan Pasukan Angkatan Laut Uni Eropa (EU NAVFOR) di Perairan Somalia dan Teluk Aden. Program ini merupakan salah satu operasi militer Uni Eropa. Operasi Atalanta EU NAVFOR beroperasi dalam kerangka Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama Eropa (CSDP) dan sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB (UNSCR) (www.eeas.europa.eu). EU NAVFOR beroperasi di Area Operasi yang meliputi Laut Merah Selatan, Teluk Aden dan sebagian besar Samudra Hindia, termasuk Seychelles, Mauritius, dan Komoro. Area Operasi juga mencakup wilayah pesisir Somalia, serta perairan teritorial dan internalnya. Ini mewakili area seluas sekitar 4.700.000 mil laut (sekitar 8.700.000 kilometer persegi).

Tabel dibawah ini merupakan rangkuman masing-masing misi dari kerjasama negara-negara di dunia dalam mengatasi perompakan. Penjelasan pada gambar diatas mencakup biaya administrasi dan penyandang dana utama pada tahun 2012.

Tabel 2.2

Anggaran Administrasi Operasi Angkatan Laut Uni Eropa

Mission	Description	Costs and Contributing Nations
European Union Operation Atalanta	<p>EU NAVFOR-Operation Atalanta was launched on December 2008, in accordance with an EU Council Joint Action. The mandate of the mission is to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deter, prevent and repress piracy and armed robbery off the coast of Somalia • Protect World Food Programme (WFP) vessels delivering aid to Somalia • Protect the vessels contributing to the African Union Mission on Somalia (AMISOM) • Protect vulnerable shipping off the Somali coast • Contribute to the monitoring of fishing activities around the Horn of Africa <p>In 2012, Operation Atalanta's mission was extended through December, 2014.</p>	<p>Administrative Costs 2012: \$11.4 million,¹² contributing nations include:</p> <p>Belgium • Croatia • France • Germany Greece • Italy • Montenegro Netherlands • Norway • Serbia • Spain Sweden • Ukraine • United Kingdom</p>
NATO Operation Ocean Shield	<p>NATO's Operation Ocean Shield has been patrolling the waters off the Horn of Africa since August 2009. The mission is to contribute to international efforts to counter maritime piracy while participating in capacity building efforts in the region.</p> <p>NATO Allies agreed on March 19, 2012 to extend Operation Ocean Shield for another two years until the end of 2014.</p>	<p>Administrative Costs 2012: ~ 5.7 million,¹³ contributing nations include:</p> <p>Canada • Denmark • Greece • Italy Netherlands • Norway • Portugal Spain • Turkey • United Kingdom United States</p>

Sumber: One Earth Future 2012, The Economic Cost of Piracy.

Menurut tabel diatas, adapun mandat dari misi EU Navfor Atalanta sesuai dengan Aksi gabungan Dewan Uni Eropa. untuk menghalangi, mencegah dan menekan kasus perompakan dan perampokan bersenjata di lepas pantai Somalia, Melindungi kapal *World Food Programme* yang sedang mengantarkan bantuan ke Somalia, Melindungi kapal misi Uni Afrika, Melindungi kapal ekspedisi, dan mengawasi kegiatan penangkapan ikan. Misi ini juga mendukung misi Uni Eropa lainnya dan organisasi internasional yang bekerja untuk memperkuat keamanan dan kapasitas maritim di kawasan terdampak (www.eunavfor.eu). Masing-masing misi terdiri dari aset laut nasional, dan dalam operasi gabungannya memiliki biaya administrasi tersendiri. Operasi Atalanta didanai melalui mekanisme pendanaan ATHENA Komisi Eksternal Uni Eropa. Mekanisme ini mencakup biaya umum seperti markas operasi, markas pasukan di atas kapal, layanan lain-lain, dan transportasi (One Earth Future Foundation 2012).

Dalam Area Operasi, unit EU NAVFOR melakukan tugas sesuai dengan Mandat. Uni Eropa bekerja sama dengan WFP dan AMISOM untuk memastikan bahwa tidak ada kapal yang mengangkut bantuan kemanusiaan (atau logistik untuk misi Uni Afrika) akan melakukan perjalanan tanpa perlindungan disepanjang garis pantai Somalia. Kapal perang NAVFOR UE juga melakukan patroli di IRTC (International Recommended Transit Corridor) di Teluk Aden dan Samudra Hindia (www.eunavfor.eu).

2.4.3. EUCAP NESTOR SOMALIA

EUCAP NESTOR adalah misi penguatan regional yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas maritim di 4 negara di Tanduk Afrika dan Samudera Hindia Barat. Uni Eropa meluncurkan EUCAP NESTOR berdasarkan Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Umum (CSDP) dan ditambah dengan keahlian militer. EUCAP NESTOR merupakan program pelengkap (EUNAVFOR - Operasi Atalanta) dan Misi Pelatihan Uni Eropa (EUTM) di Somalia. EUCAP NESTOR memiliki mandat awal dua tahun (www.eucap-som.eu).

Awalnya operasi ini dilaksanakan di lima negara di Tanduk Afrika dan Samudera Hindia Barat (Djibouti, Somalia, Seychelles, Kenya, dan Tanzania). Setelah mengalami peninjauan kembali pada tahun 2015, kegiatan regional dihapus. Pada akhir 2015 Uni Eropa memindahkan markas operasi ke Mogadishu untuk memfokuskan upaya pada Somalia. Adapun tujuannya untuk memperkuat kapasitas keamanan maritim Somalia untuk secara efektif mengatur perairannya dan memperkuat kemampuannya untuk memerangi pembajakan. Saat ini misi tersebut memiliki personel yang berlokasi di Somalia (MHQ di Mogadishu dan Kantor Lapangan di Hargeisa, Somaliland) dan back-office MHQ di Nairobi (European Union External Action 2016).

EUCAP Nestor diberi mandat untuk mendukung pengembangan lembaga penegak hukum keamanan laut di Somalia dan kerangka hukum keamanan laut. Misi tersebut menunjukkan komitmen Uni Eropa dalam perang melawan pembajakan dan upaya berkelanjutan untuk mengembangkan instrumen kapasitas keamanan maritim yang relevan termasuk rantai peradilan pidana “dari kejahatan ke pengadilan”, dimulai dengan penangkapan dan penahanan tersangka hingga investigasi dan penuntutan kejahatan. Penerima manfaat Nestor adalah penjaga pantai, angkatan laut, polisi pantai dan maritim, jaksa dan hakim. Saran tingkat strategis Misi didukung oleh koordinasi dan fasilitasi pelatihan khusus untuk mendukung upaya peningkatan kapasitas (European union External Action 2016).

Sebagai bagian dari mandatnya, EUCAP Nestor telah mempromosikan kerja sama regional dalam keamanan maritim. Serangkaian acara regional diselenggarakan, termasuk konferensi regional tentang keamanan maritim pada tahun 2013, serta serangkaian lokakarya regional di Nairobi dan Djibouti untuk para jaksa penuntut, hakim dan praktisi hukum lainnya tentang perang melawan perompakan dan kejahatan maritim lainnya. Di Somalia, EUCAP membantu pihak berwenang untuk mengembangkan kapasitas mandiri dalam keamanan maritim yang memungkinkan mereka untuk memerangi perompakan dengan lebih efektif. Saat ini, misi ini menawarkan saran strategis dan operasional termasuk dukungan penyusunan undang-undang (www.eucap-som.eu).